

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 1 Desember 2014

Subyek : Hutan

Hal : 13

JANGAN ASAL MELIBATKAN MASYARAKAT

Pernyataan Presiden Joko Widodo agar pengelolaan hutan diberikan kepada masyarakat memperoleh apresiasi. Namun, penerapannya mutlak perlu kehatian-hatian. Tidak semua masyarakat di sekitar hutan punya kapasitas dan ketertarikan mengelola hutan secara lestari.

”Jangan digeneralisasi pengelolaan hutan oleh masyarakat pasti baik. Sangat kondisional di tiap tempat,” kata Dodik Ridho Nurrochmat, Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB di sela Diskusi Kajian Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Bogor yang menghadirkan sejumlah pembicara, Sabtu (29/11).

Umumnya, kata Dodik, hutan terjaga baik ketika dikelola masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung dari hasil hutan. Untuk itu, pertimbangan menentukan hak kelola tergantung kapasitas negara dan masyarakat.

Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya tak hanya memiliki peta tutupan hutan. Namun, juga memiliki peta sosial masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan.

”Dasar peta sosial akan memudahkan pemerintah menentukan pengelola hutan secara benar dan presisi,” kata Dodik.

Pernyataan Presiden Joko Widodo agar pengelolaan diberikan kepada masyarakat disampaikan saat ”blusukan” kebakaran hutan dan lahan di Sungai Tohor, Kepulauan Meranti, Riau, Kamis pekan lalu. ”Yang paling baik memang diberikan kepada masyarakat untuk diolah menjadi lahan sagu. Lahan yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap ekosistem, tetapi jika diberikan pada perusahaan akan monokultur,” kata Jokowi, ketika itu.

Didik Suharjito, Guru Besar Kehutanan Sosial IPB, mendukung pernyataan Presiden. Dari sisi ekonomi, pemberian hak kelola kehutanan sosial melalui Hutan Desa maupun Hutan Kemasyarakatan mampu menggerakkan perekonomian di desa. Kalau terwujud, itu juga dapat mengurangi urbanisasi atau tekanan di perkotaan.

Dibarengi contoh

Peningkatan hak kelola kehutanan sosial menjadi target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2014). Area kawasan hutan yang dikelola masyarakat secara lestari mencapai 10 juta hektar (2015) dan 40 juta hektar (2019). Namun, dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030, target luas kawasan hutan yang dialokasikan usaha hutan skala kecil 5,6 juta hektar atau 11,3 persen dibandingkan alokasi kawasan hutan untuk usaha kehutanan skala besar seluas 43,6 juta hektar (88,7 persen).

Didik mengatakan, pengelolaan hutan oleh masyarakat akan berhasil bila mendapat contoh pengelolaan hutan oleh perusahaan yang baik, serta pengawasan dan pembinaan dari pemerintah. ”Istilah Pak Jokowi, negara harus hadir. Pembinaan oleh penyuluh kehutanan maupun pengawasan menunjukkan kehadiran itu,” katanya. (ICH).